BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan terarah dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan melibatkan fungsi-fungsi manajemen yang terstruktur. Dalam konteks pembangunan daerah, pelaksanaan setiap program dan kegiatan untuk mencapai hasil akhir yang baik dan efektif, dibutuhkan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur stakeholder's atau pemangku kepentingan, sehingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menetapkan tata cara perencanaan pembangunan yang meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dalam kurun waktu 20 tahunan, jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahunan serta Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahunan. Perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehenship mengandung rangkaian perencana yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (up-down) dan bawah-atas (down-up).

Rancangan awal RKPD merupakan acuan penyusunan Renja OPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan baru, indikator kinerja, kelompok sasaran dan hal-hal terkait lainnya yang menjadi bahan RKPD.Berdasakan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyusun Renja OPD. Dalam mencapai hasil yang diharapkan,

pelaksanaan perencanaan dihadapakan pada berbagai masalah dan tantangan, serta berbagai resiko yang timbul.Oleh karena itu, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja OPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
12. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai pedoman/acuan didalam pelaksanaan/pengendalian program dan kegiatan pembangunan dibidang Koperasi dan UKM dalam tahun periode 2025 dan bahan penyusunan RKA serta sebagai bahan penyusunan RKPD Kab. Labuhanbatu.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu adalah :

- Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
- Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.

- Sebagai bahan paparan dalam rangka forum OPD, musrenbang dan bahan penyusunan RKA serta sebagai bahan penyusunan RKPD Kab. Labuhanbatu.

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu merupakan pedoman untuk rencana tahunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Secara garis besar Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja TW I OPD Tahun 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja TW I OPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
- 2.2. Issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan serta terdiri dari 30 sub kegiatan. Alokasi anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp. **4,194,818,553** meliputi belanja Pegawai sebesar **Rp. 3,364,937,605** dan belanja barang jasa sebesar **Rp 829,880,948** Realisasi keuangan sampai dengan Juni 2025 (Triwulan II) sebesar **Rp 1,970,319,160 atau sebesar 47,97 %.**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tw II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3,825,995,303**	**1,876,353,060**	**49.04%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,250,000	6,700,000	43.93%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,100,000	600,000	28.57%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,100,000	2,000,000	95.24%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,100,000	-	0.00%
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,550,000	2,500,000	98.04%
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,100,000	-	0.00%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	2,100,000	1,000,000	47.62%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,200,000	600,000	27.27%
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	3,574,619,070	3,083,715,675	86
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,299,827,605	1,628,489,210	49.35%
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63,010,000	20,050,000	31.82%

	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,100,000	2,000,000	95,24
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,028,000	-	0.00%
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	-	-	0.00%
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Aribut Kelengkapannya	12,028,000	-	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185,577,248	121,402,800	65.42%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,976,180	940,000	13.47%
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	0
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,175,974	1,925,000	26.83%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,350,094	10,491,000	26.66%
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,250,000	5,447,500	38.23%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000	10,000,000	66.67%
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	17,390,000	7,180,000	41.29%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85,435,000	85,419,300	99.98%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201,811,800	72,296,050	35.82%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,600,000	1,800,000	50.00%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,568,000	18,145,600	30.46%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138,643,800	52,350,450	37.76%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,390,650	25,415,000	54.78%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,631,450	789,000	21.73%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,039,200	17,306,000	54.02%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,720,000	7,320,000	68.28%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46,390,650	25,415,000	54.78%
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	103,249,050	56,595,000	54.81%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	103,249,050	56,595,000	54.81%

	Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	- Pengawasan Kekuatan,Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	103,249,050	56,595,000	54.81%
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**14,334,000**	**12,753,800**	**88.98%**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	14,334,000	12,753,800	88.98%
	- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14,334,000	12,753,800	88.98%
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**47,497,300**	**-**	**0.00%**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota	47,497,300	-	0.00%
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**70,034,000**	**17,357,300**	**24.78%**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70,034,000	17,357,300	24.78%
	- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70,034,000	17,357,300	24.78%
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**128,408,900**	**3,260,000**	**2.54%**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	128,408,900	3,260,000	2.54%
	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	109,826,900	-	0.00%
	- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	18,582,000	3,260,000	17.54%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**5,300,000**	**4,000,000**	**75.47%**
	Pengembangan Usaha Mikro	5,300,000	4,000,000	75.47%
JUMLAH		**4,194,818,553**	**1,970,319,160**	**46.97%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu sebagai lembaga teknis bidang koperasi dan UKM dituntut untuk mampu berperan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ekonomi berdasarkan tugas dan fungsi OPD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan struktural dinas - dinas daerah Kabupaten Labuhanbatu. sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu merupakan strategi pada tingkat kebijakan yang dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Adapun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TUGAS POKOK :

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
3. Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Mengoordinasikan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan;

SEKRETARIAT

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan serta mengoordinasikan program kegiatan, pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

FUNGSI :

1. Mengoordinasikan rumusan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
2. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga Dinas;
3. Melaksanakan rencana anggaran belanja Dinas;
4. Menyelenggarakan urusan keuangan Dinas;
5. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan dan Kebijakan dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas;
6. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan pengelolaan data statistik;
7. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di Sekretariat Dinas;
8. Mengoordinasikan administrasi kegiatan Bidang pada Dinas;
9. Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan;

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan bahan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian Bimbingan Kelembagaan dan pengawasan, perizinan, keanggotaan dan penerapan aturan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP.

FUNGSI :

1. Merumuskan Rencana dan Program Kerja Bidang kelembagaan dan pengawasan
2. Menyiapkan bahan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan Kelembagaan dan pengawasan Koperasi yang meliputi penyuluhan, perizinan, keanggotaan, dan penerapan aturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP.
3. Melaksanakan pengelolaan kegiatan kelembagaan dan pengawasan Koperasi yang meliputi penyuluhan, perizinan, keanggotaan, dan penerapan aturan pengawasan pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP.
4. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan Dinas dalam rangka pembinaan Koperasi.
5. Membina Koperasi-koperasi yang tidak melakukan kegiatan Kelembagaan dan pengawasan.
6. Melakukan pengawasan dan Pengendalian Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Kabupaten.
7. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang kelembagaan dan pengawasan.
8. Menyusun laporan dan Evaluasi pelaksanaan tugas bidang
9. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja lain serta Instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembinaan kelembagaan dan Pengawasan.
10. Membina hubungan kemitraan antar Koperasi, Pengusaha Kecil, Pengusaha Menengah, dan Pengusaha Besar.
11. Melaksanakan Tugas - tugas yang diperintahkan atasan.

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan perumusan dan penjabaran teknis, pengelolaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi, pengembangan penguatan dan perlindungan usaha koperasi dan peningkatan kualitas SDM koperasi.

FUNGSI :

1. Merumuskan Rencana dan Program Kerja pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
2. Menyiapkan bahan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan pemberdayaan dan pengembangan koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi dan peningkatan kualitas SDM koperasi.
3. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi dan peningkatan kualitas SDM koperasi.
4. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan Dinas dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
5. Membina Koperasi yang tidak melakukan kegiatan usaha Koperasi.
6. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
7. Menyusun laporan dan Evaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
8. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja lain serta Instansi terkait dalam melaksanakan tugas pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
9. Membina Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha di bidang Agrobisnis dan Simpan Pinjam
10. Mengevaluasi Usaha dan Administrasi Koperasi tentang permohonan bantuan untuk pengembangan usaha.
11. Membina hubungan kemitraan antar Koperasi, Pengusaha Kecil, Pengusaha Menengah, dan Pengusaha Besar.
12. Mengevaluasi kegiatan Usaha Koperasi baik dibidang Agrobisnis, Simpan Pinjam, dan Usaha yang dikelola Koperasi
13. Melaksanakan tugas – tugas lain yang perintahkan atasan.

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan perumusan dan penjabaran teknis, pengelolaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro dan peningkatan kualitas kewirausahaan.

FUNGSI :

1. Merumuskan Rencana dan Program Kerja Bidang pemberdayaan usaha mikro.
2. Menyiapkan bahan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan pemberdayaan usaha mikro, yang meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro dan peningkatan kualitas kewirausahaan.
3. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, yang meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro dan peningkatan kualitas kewirausahaan.
4. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan Dinas dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan usaha mikro.
5. Melakukan pendataan dan membuat database terhadap usaha mikro.
6. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang pemberdayaan usaha mikro.
7. Menyusun laporan dan Evaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan usaha mikro.
8. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja lain serta Instansi terkait dalam melaksanakan tugas pemberdayaan usaha mikro.
9. Melaksanakan konsultasi dan bimbingan teknis untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan manajemen usaha dan kewirausahaan Mikro.
10. Menyusun bahan rekomendasi data teknis

11. Membina hubungan kemitraan antar usaha mikro, Pengusaha Kecil, Pengusaha Menengah, dan Pengusaha Besar maupun koperasi.
12. Melaksanakan tugas – tugas lain yang perintahkan atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan selama pelaksanaan otonomi daerah. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pembangunan bidang Koperasi dan UKM daerah di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan bidang Koperasi dan UKM tersebut meliputi :

1. Meningkatnya Koperasi yang Aktif dan terciptanya Koperasi Baru
2. Meningkatnya Jumlah Produk UMKM
3. Terciptanya Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap pernyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada masyarakat mengupayakan pada pengoptimalan Peran Koperasi yang ada di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu dengan mengadakan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi. Selain itu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) untuk meningkatkan Produktivitas UKM.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Labuhanbatu yaitu *" **DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH TANGGUH SERTA KOPERASI YANG SEHAT**",* maka hal itu sangat sinkron dengan kebijakan nasional yang mengacu pada kebijakan nasional antara lain dengan meningkatkannya daya saing potensi produk unggulan daerah, meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif, Meningkatkan pertumbuhan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan diatas, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang

memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan visi misinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Labuhanbatu, maka Misi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu adalah **Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industry kreatif.**

Tujuan yang akan dicapai dari Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Koperasi yang Aktif;
2. Peningkatan Produktivitas UMKM;
3. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan SDM UKM

Dari tujuan tersebut maka rencana sasaran yang ingin dicapai dalam periode Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperasi yang Aktif dan Terciptanya Koperasi yang Baru
2. Meningkatnya Jumlah Produk UMKM
3. Terciptanya Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran merupakan bagian penting yang ingin dicapai melalui program yang direncanakan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi

satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Setiap program memiliki kuantitas atau kualitas capaian yang diinginkan untuk mencapai sasaran dan tujuan, selain itu digunakan untuk mencapai alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu menyusun Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintah daerah**	
Kegiatan : - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5 Dok

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	20 Laporan
Kegiatan : - Administrasi Keuangan	**Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	6 Og
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	2 Laporan
Kegiatan : - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Og
Kegiatan : -Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	5 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan
Kegiatan : -Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	1 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	17 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Kegiatan : -Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten		
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	180 Unit Usaha
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Meningkatnya Citra Koperasi**	
Kegiatan : -Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Satu Daerah Kabupaten		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	60 Unit Usaha
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Peningkatan Jumlah Koperasi**	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	60 Orang
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Semakin Meningkatnya Kualitas Koperasi	
Kegiatan : -Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota		

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Wewenang Provinsi	Koperasi Semakin Sehat dan berkembang	180 Unit Usaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	**Semakin Sehatnya Koperasi**	
Kegiatan : -Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Jabatan	**Koperasi Koperasi semakin baik**	
Pendataan Potensi dan Pengmbangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	60 Unit Usaha
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	60 Unit Usaha

BAB IV

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten labuhanbatu Tahun 2025 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan bidang koperasi dan UKM di Kabupaten Labuhanbatu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Terdapat 6 program, 11 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4,651,875,327,- yang digunakan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Non ursan dan urusan wajib sebagaimana table di bawah ini :

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka proses pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 tidak lepas dari ketidak sempurnaan oleh karena itu dibutuhkan masukan dan saran yang mendukung untuk kemajuan bersama.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 disusun dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Rantauprapat, Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Said Ali Harahap, S.Sos, M.SI

NIP. 196609261986111001

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**4.651.875.327,00**	**4.666.037.035,00**	**4.971.164.518,00**	**319.289.191,00**							**4.903.800.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.651.875.327,00**	**4.666.037.035,00**	**4.971.164.518,00**	**319.289.191,00**							**4.903.800.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.651.875.327,00**	**4.666.037.035,00**	**4.971.164.518,00**	**319.289.191,00**							**4.903.800.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**				**90 %**	**90 %**	**3.845.825.327,00**	**3.949.078.785,00**	**4.063.144.818,00**	**108.974.673,00**							**3.954.800.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	18.050.000,00	18.050.000,00	15.250.000,00	-2.800.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Aparatur Penyusun Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Kali 30 Orang/bulan	14 Kali 30 Orang/bulan	3.063.541.107,00	3.251.646.486,00	3.596.391.120,00	532.850.013,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		3.187.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.982.541.107,00	3.170.646.486,00	3.531.281.120,00	548.740.013,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			3.100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	78.900.000,00	78.900.000,00	63.010.000,00	-15.890.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya*				37 Paket	37 Paket	86.514.000,00	47.888.000,00	12.028.000,00	-74.486.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN dan Non ASN		94.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	47.664.000,00	23.832.000,00	0,00	-47.664.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			52.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	38.850.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	-26.822.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			42.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	393.683.820,00	380.861.849,00	200.891.248,00	-192.792.572,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN dan Non ASN		384.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.986.250,00	6.976.180,00	6.976.180,00	-10.070,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			7.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.294.000,00	21.535.000,00	0,00	-35.294.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.835.220,00	7.850.686,00	7.175.974,00	-659.246,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			8.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	57.749.850,00	51.705.983,00	39.350.094,00	-18.399.756,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			62.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.736.500,00	14.250.000,00	16.500.000,00	5.763.500,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.432.000,00	21.432.000,00	17.390.000,00	-4.042.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			23.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	238.650.000,00	242.112.000,00	98.499.000,00	-140.151.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			215.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia*				100 %	100 %	207.733.800,00	201.811.800,00	192.193.800,00	-15.540.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN dan Non ASN		205.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.090.000,00	59.568.000,00	49.950.000,00	-16.140.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	138.643.800,00	138.643.800,00	138.643.800,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			136.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan Baik Guna Menunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Unit	5 Unit	76.302.600,00	48.820.650,00	46.390.650,00	-29.911.950,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN		64.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	2.270.100,00	3.631.450,00	3.631.450,00	1.361.350,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45.562.500,00	34.469.200,00	32.039.200,00	-13.523.300,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			47.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18.810.000,00	0,00	0,00	-18.810.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	9.660.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	1.060.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Cakupan Koperasi yang Melakukan Kegiatan sesuai Ijin Cakupan Pengawasan dan pemeriksaan koperasi**				**100 90 % %**	**100 90 % %**	**163.450.000,00**	**160.920.750,00**	**90.229.000,00**	**-13.450.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang Diawasi*				183 koperasi	183 koperasi	163.450.000,00	160.920.750,00	90.229.000,00	-73.221.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Pelaku Koperasi Aktif		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				180 Unit Usaha	180 Unit Usaha	163.450.000,00	160.920.750,00	90.229.000,00	-73.221.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Status koperasi Persentase peningkatan status koperasi**				**85 85 % persen**	**85 85 % persen**	**44.500.000,00**	**39.830.000,00**	**14.334.000,00**	**5.500.000,00**							**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Labuhanbatu*				60 Koperasi	60 Koperasi	44.500.000,00	39.830.000,00	14.334.000,00	-30.166.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Koperasi		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	44.500.000,00	39.830.000,00	14.334.000,00	-30.166.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Pelaku UMKM dan Koperasi yang Terlatih**				**80 %**	**80 %**	**123.900.000,00**	**131.310.750,00**	**41.833.800,00**	**26.100.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk Pelatihan*				75 Koperasi	75 Koperasi	123.900.000,00	131.310.750,00	41.833.800,00	-82.066.200,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Koperasi		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	123.900.000,00	131.310.750,00	41.833.800,00	-82.066.200,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Sehat, Berkembang dan Maju**				**100 %**	**100 %**	**218.000.000,00**	**104.830.000,00**	**127.534.000,00**	**117.000.000,00**							**335.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Dibina*				75 Koperasi	75 Koperasi	218.000.000,00	104.830.000,00	127.534.000,00	-90.466.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Kabupaten Labuhanbatu		335.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	60 Unit Usaha	0,00	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				180 Unit Usaha	180 Unit Usaha	218.000.000,00	104.830.000,00	70.034.000,00	-147.966.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM aktif dan produktif**				**85 persen**	**85 persen**	**218.400.000,00**	**265.066.750,00**	**628.788.900,00**	**5.600.000,00**							**224.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang Bermitra dengan Pelaku Usaha dalam Pemasaran Produk*				85 %	85 %	218.400.000,00	265.066.750,00	628.788.900,00	410.388.900,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	UMKM		224.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	170.000.000,00	210.922.750,00	610.206.900,00	440.206.900,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	48.400.000,00	54.144.000,00	18.582.000,00	-29.818.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			74.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**persentase pelaku UMKM dengan pemasaran produknya berbasis online**				**350 UMKM**	**350 UMKM**	**37.800.000,00**	**15.000.000,00**	**5.300.000,00**	**2.200.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Pelaku UMKM dengan Pemasaran Produknya Berbasis Online*				30 %	30 %	37.800.000,00	15.000.000,00	5.300.000,00	-32.500.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	UMKM		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	37.800.000,00	15.000.000,00	5.300.000,00	-32.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H								**4.651.875.327,00**	**4.666.037.035,00**	**4.971.164.518,00**	**319.289.191,00**							**4.903.800.000,00**	